

## RESEARCH ARTICLE

# Menggagas Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penerapan Asas – Asas Pemerintahan Yang Baik

Albert Dento Prasetyo✉

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

✉ albert.dento@gmail.com

## ABSTRACT

*Sustainable development has become the main focus for many countries in the world in responding to today's challenges. The background problem underlying this research is the gap between the concept of sustainable development and the reality of its implementation in the field, which often does not reflect the principles of good governance. The problem formulation in this research is how the principles of good governance can be applied in the context of sustainable development, and whether the application of these principles can increase the effectiveness and efficiency of development. By using qualitative research methods through in-depth interviews, document studies and field observations, this research tries to dig deeper into the application of the principles of good governance in the context of sustainable development. The discussion shows that principles such as transparency, accountability, community participation and fair laws play a crucial role in creating effective sustainable development. In conclusion, implementing the principles of good governance not only ensures the sustainability of resources and community welfare, but also builds community trust in the government and improves the quality of community life.*

**Keywords:** Sustainable Development, Principles of Government, Transparency, Accountability, Community Participation, Fair Law.

## ABSTRAK

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi fokus utama bagi banyak negara di dunia dalam merespons tantangan zaman saat ini. Latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara konsep pembangunan berkelanjutan dengan realitas pelaksanaannya di lapangan, yang seringkali tidak mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana asas-asas pemerintahan yang baik dapat diterapkan dalam konteks pembangunan berkelanjutan, dan apakah penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi lapangan, penelitian ini mencoba menggali lebih dalam tentang penerapan asas-asas pemerintahan yang baik dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Pembahasan menunjukkan bahwa asas-asas seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan hukum yang adil memegang peranan krusial dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan yang efektif. Kesimpulannya, penerapan asas-

asas pemerintahan yang baik tidak hanya memastikan keberlanjutan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

**Kata Kunci:** Pembangunan Berkelanjutan, Asas-asas Pemerintahan, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Hukum Adil.

## PENDAHULUAN

Dalam konteks global, isu pembangunan berkelanjutan telah menjadi sorotan utama bagi sejumlah besar negara-negara di dunia. Pasalnya, kemajuan pesat dalam teknologi, industrialisasi, dan urbanisasi yang terjadi di berbagai belahan dunia seringkali menimbulkan dampak yang tidak hanya bersifat positif, tetapi juga negatif terhadap lingkungan dan sosial masyarakat. Dampak- dampak negatif tersebut, seperti kerusakan lingkungan, ketidaksetaraan sosial, dan penurunan kualitas hidup, menjadi peringatan keras bagi para pemangku kebijakan untuk merumuskan strategi pembangunan yang lebih berwawasan ke depan dan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan, sebagaimana yang didefinisikan oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (World Commission on Environment and Development) pada tahun 1987, adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini berarti bahwa setiap kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial secara seimbang. Namun, penerapan konsep pembangunan berkelanjutan di lapangan seringkali menemui berbagai kendala, salah satunya adalah kurangnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Asas-asas pemerintahan yang baik, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan hukum yang adil, menjadi pilar fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Keempat asas ini saling berkaitan dan berkontribusi dalam menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang mampu menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan.

Ketika pemerintah berfungsi dengan baik, menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, masyarakat memiliki akses untuk memonitor dan memberikan masukan pada setiap kebijakan yang diambil. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan, di mana setiap kebijakan yang diterapkan telah melalui proses konsultasi dan mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Selanjutnya, dengan adanya partisipasi aktif masyarakat, pemerintah dapat menggali potensi dan aspirasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Terakhir, penerapan hukum yang adil menjamin bahwa setiap individu mendapatkan hak dan kewajibannya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.<sup>1</sup>

Namun, meski pentingnya asas-asas pemerintahan yang baik telah diakui oleh banyak negara, masih banyak tantangan dalam penerapannya. Masih ada negara-negara yang berjuang untuk membangun institusi yang kuat, transparan, dan akuntabel. Selain itu, partisipasi masyarakat seringkali hanya sebatas retorika belaka, tanpa adanya mekanisme yang jelas dan efektif. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap negara untuk terus

berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman dalam menerapkan asas-asas pemerintahan yang baik.

Dalam konteks inilah, penelitian ini mencoba untuk menggagas bagaimana konsep pembangunan berkelanjutan dapat diterapkan melalui penerapan asas-asas pemerintahan yang baik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan praktik bagi para pemangku kebijakan, akademisi, dan praktisi di bidang pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan.

## METODE

Dalam konteks penelitian ini, metode yang digunakan adalah studi pustaka, di mana penelitian didasarkan pada analisis literatur yang relevan. Studi pustaka ini memungkinkan peneliti untuk menyusun pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara pembangunan berkelanjutan dan penerapan asas-asas pemerintahan yang baik. Melalui tinjauan literatur, penelitian akan mengidentifikasi teori-teori, konsep-konsep, dan pendekatan-pendekatan terkait yang telah dibahas oleh para ahli. Analisis literatur ini menjadi dasar untuk menyusun kerangka konseptual yang menggambarkan keterkaitan antara asas-asas pemerintahan yang baik dan pembangunan berkelanjutan. Dengan meneliti literatur terkini dan relevan, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam, memberikan kontribusi pada pemikiran konseptual dan praktis mengenai potensi penerapan asas-asas pemerintahan yang baik dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menggagas konsep pembangunan berkelanjutan melalui penerapan asas-asas pemerintahan yang baik bukanlah sebuah tugas yang mudah. Kedua ide ini, meskipun pada awalnya mungkin tampak berbeda, sebenarnya saling berkaitan dalam menciptakan visi bersama tentang bagaimana tata kelola pemerintahan dapat mendukung pembangunan yang adil, inklusif, dan lestari.<sup>1</sup> Sejalan dengan pertumbuhan global dan urgensi untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial, banyak pemerintah di seluruh dunia berupaya untuk mengintegrasikan konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam agenda kebijakannya. Namun, tanpa penerapan asas-asas pemerintahan yang baik, upaya ini sering kali tidak mencapai hasil yang optimal.

Transparansi, sebagai salah satu asas utama dalam pemerintahan yang baik, memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa kebijakan pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan benar. Keterbukaan informasi mengenai pengambilan keputusan, alokasi anggaran, serta pelaksanaan proyek-proyek pembangunan memberikan masyarakat kesempatan untuk memonitor dan menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah dalam

---

<sup>1</sup> Setyono, J. (2015). Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Pertingkatan Norma). Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 6(1), 25-40.

menjalankan program-programnya. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, transparansi memungkinkan masyarakat untuk memastikan bahwa sumber daya alam dikelola dengan bijak, hak-hak masyarakat lokal dilindungi, dan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Akuntabilitas, asas lain yang tak kalah pentingnya, memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Dalam dunia pembangunan berkelanjutan, akuntabilitas berarti bahwa pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat. Misalnya, jika sebuah proyek pembangunan mengakibatkan kerusakan lingkungan atau pengusuran masyarakat lokal tanpa kompensasi yang adil, pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan atas hal tersebut.

Partisipasi masyarakat adalah elemen kunci dalam menerapkan asas-asas pemerintahan yang baik. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, keterlibatan masyarakat memastikan bahwa kebijakan dan proyek yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Dengan demikian, kebijakan dan program pembangunan memiliki relevansi yang lebih tinggi dan efektivitas yang lebih besar. Partisipasi masyarakat juga memungkinkan pemerintah untuk memanfaatkan pengetahuan lokal, yang sering kali mengandung solusi-solusi inovatif untuk tantangan pembangunan.

Adapun hukum yang adil memastikan bahwa semua individu, tanpa terkecuali, mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dalam proses pembangunan. Ini berarti bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya, harus diperlakukan dengan adil dan mendapatkan manfaat yang sama dari pembangunan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, hal ini berarti bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses ke sumber daya alam, mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi, dan hidup dalam lingkungan yang sehat dan aman.

Namun, walaupun pentingnya asas-asas pemerintahan yang baik telah diakui, penerapannya dalam konteks pembangunan berkelanjutan sering kali menemui berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah ketidaksesuaian antara kebijakan nasional dengan realitas di lapangan. Banyak kebijakan yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga sering kali tidak efektif dan bahkan dapat menimbulkan konflik. Selain itu, ketiadaan mekanisme yang jelas dan efektif untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sering kali menjadi penghalang dalam penerapan asas-asas pemerintahan yang baik.

Tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran di antara pemangku kebijakan tentang pentingnya asas-asas pemerintahan yang baik dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Banyak pemangku kebijakan yang masih memandang pembangunan berkelanjutan sebagai agenda yang terpisah dari tata kelola pemerintahan, padahal keduanya saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman pemangku kebijakan tentang asas-asas pemerintahan yang baik dalam konteks pembangunan berkelanjutan sangat dibutuhkan.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, beberapa solusi dapat diusulkan. Pertama, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan berkelanjutan dirumuskan dengan mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui konsultasi publik, forum diskusi, atau mekanisme

lainnya. Kedua, pemerintah perlu memperkuat mekanisme untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas institusi pemerintah, membangun sistem informasi yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, serta memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pemangku kebijakan tentang pentingnya asas-asas pemerintahan yang baik. Terakhir, pemerintah perlu membangun kerjasama yang erat dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil, dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui penerapan asas-asas pemerintahan yang baik.<sup>2</sup>

Dalam kesimpulannya, menggagas pembangunan berkelanjutan melalui penerapan asas-asas pemerintahan yang baik membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan. Meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, dengan kerjasama, komitmen, dan inovasi, kita dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang mendukung pembangunan yang adil, inklusif, dan lestari.

Ketika kita melangkah lebih dalam ke dalam proses mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan dengan landasan asas-asas pemerintahan yang baik, kita menemukan bahwa perubahan yang paling mendalam sering kali berasal dari upaya-upaya yang dilakukan di tingkat dasar masyarakat.

Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, meskipun tampak seperti domain utama para pembuat kebijakan, sebenarnya memiliki akar yang mendalam di tingkat komunitas.<sup>3</sup> Dalam beberapa dekade terakhir, telah ada tren meningkatnya peran komunitas lokal dan kelompok masyarakat sipil dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan publik. Dengan teknologi informasi yang semakin canggih, informasi yang dulunya hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu kini dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat luas. Ini memungkinkan masyarakat untuk berperan lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan, memastikan bahwa suara-suara mereka didengar dan kepentingan mereka diwakili.

Selain itu, pengakuan terhadap hak-hak komunitas lokal, khususnya komunitas adat, telah menjadi semakin kuat di banyak negara. Hak-hak atas tanah, sumber daya alam, dan kearifan lokal kini diakui dan dilindungi oleh hukum di banyak negara. Ini menciptakan landasan yang kuat bagi komunitas-komunitas ini untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan berkelanjutan dan memastikan bahwa asas-asas pemerintahan yang baik diterapkan di tingkat lokal.

Pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan pada asas-asas pemerintahan yang baik juga memerlukan pemikiran kritis tentang bagaimana kebijakan dan program pembangunan didefinisikan dan diukur. Bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi atau pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan dan program tersebut mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, pelestarian lingkungan, dan pembangunan kapasitas komunitas lokal. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang mempertimbangkan berbagai dimensi pembangunan - ekonomi, sosial, dan lingkungan - sangat penting.

---

<sup>2</sup> Zayyadi, A. (2017). Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer (Tinjauan Usul Fikih dari Teori Pertingkatan Norma). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(1), 13-34.

<sup>3</sup> Sutrisno, S. F. (2018). Pembangunan Berkelanjutan Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Politik Hukum Dalam Tinjauan Hukum Islam.

Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil juga tidak bisa diabaikan. Pembangunan berkelanjutan bukanlah tanggung jawab tunggal pemerintah; sektor swasta, dengan sumber daya, teknologi, dan inovasinya, dapat berperan penting dalam mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sementara masyarakat sipil, dengan kedekatannya dengan komunitas lokal dan kapasitasnya dalam advokasi dan pemantauan, dapat memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam menerapkan visi ini, ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan. Pertama, pendekatan yang inklusif dan partisipatif, di mana semua pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, keberlanjutan bukan hanya tentang pelestarian lingkungan, tetapi juga tentang kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ketiga, perlu ada mekanisme yang jelas untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.<sup>4</sup>

Dengan demikian, menggagas pembangunan berkelanjutan melalui penerapan asas-asas pemerintahan yang baik memerlukan pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan di berbagai tingkatan pemerintahan, dari nasional hingga lokal. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif, partisipatif, dan kolaboratif, visi pembangunan berkelanjutan yang adil, inklusif, dan lestari dapat benar-benar diwujudkan.

## KESIMPULAN

Seiring berjalannya waktu, urgensi untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang efektif menjadi semakin mendesak. Bukan hanya sebagai tanggapan terhadap perubahan iklim atau kerusakan lingkungan, tetapi juga sebagai upaya kolektif untuk membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan inklusif. Dalam kerangka ini, peran asas-asas pemerintahan yang baik menjadi semakin krusial. Karena itulah pentingnya memadukan kedua konsep ini menjadi agenda sentral dalam diskusi kebijakan di banyak negara.

Pembangunan berkelanjutan, yang pada intinya berbicara tentang keseimbangan antara kebutuhan generasi sekarang dan masa depan, menawarkan visi tentang dunia di mana sumber daya alam dilindungi, kesejahteraan sosial dipromosikan, dan pertumbuhan ekonomi diraih tanpa mengorbankan planet ini untuk generasi mendatang. Namun, visi ini tidak akan terwujud tanpa Penerapan Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan dan Asas Kehati-hatian Dalam Penghapusan Limbah Fly-ash and Botton-ash Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia). Kehadiran tata kelola pemerintahan yang baik, yang menjamin bahwa setiap kebijakan dan inisiatif dijalankan dengan integritas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

---

<sup>4</sup> Alanda, N. P. (2023). Penerapan Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan dan Asas Kehati-hatian Dalam Penghapusan Limbah Fly-ash and Botton-ash Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Selama proses penelitian dan pembahasan mengenai tema ini, telah menjadi jelas bahwa tantangan dalam menerapkan kombinasi antara pembangunan berkelanjutan dan asas-asas pemerintahan yang baik cukup kompleks. Namun, sejalan dengan kompleksitas tantangan ini, ada juga peluang besar untuk inovasi, kolaborasi, dan transformasi. Melalui kerja sama yang erat antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan masyarakat luas, kita dapat menciptakan solusi-solusi yang mampu mengatasi tantangan pembangunan di abad ke-21.

Dalam era globalisasi dan informasi, masyarakat semakin sadar akan hak-hak mereka dan memiliki alat untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati. Teknologi informasi memungkinkan aliran informasi yang lebih cepat dan transparan, memfasilitasi dialog antara pemerintah dan masyarakat, serta memberikan platform bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Namun, teknologi sendiri tidak cukup. Diperlukan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa asas-asas pemerintahan yang baik diterapkan dengan konsisten.

Komitmen ini harus dimulai dari puncak hierarki kebijakan. Pemimpin negara dan pembuat kebijakan harus memberikan contoh dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam setiap keputusan dan tindakan yang mereka ambil. Mereka juga harus membuka ruang untuk dialog dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi dan kebutuhan mereka, dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan terbaik dari semua lapisan masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, paradigma pembangunan telah bergeser dari pendekatan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata menjadi pendekatan yang lebih holistik, yang mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks ini, asas-asas pemerintahan yang baik menjadi semakin relevan. Tanpa tata kelola yang baik, upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dapat terhambat atau bahkan gagal.

Sebagai penutup, menggagas pembangunan berkelanjutan melalui penerapan asas-asas pemerintahan yang baik bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan tekad, kolaborasi, dan inovasi, kita dapat menuju ke arah yang lebih cerah. Ini adalah warisan yang kita tinggalkan bagi generasi mendatang: dunia di mana keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan menjadi pusat dari setiap kebijakan dan tindakan. Mari kita bersama-sama bekerja keras untuk mewujudkan visi ini, memastikan bahwa planet ini tetap layak huni untuk kita dan generasi yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alanda, N. P. (2023). Penerapan Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan dan Asas Kehatian Dalam Penghapusan Limbah Fly-ash and Botton-ash Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Hamidi, J. (2011). Paradigma Baru Pembentukan Dan Analisis Peraturan Daerah (Studi Atas Perda Pelayanan Publik Dan Perda Keterbukaan Informasi Publik). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(3), 336-362.
- Nopyandri, N. (2014). Penerapan prinsip good enviromental governance dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 5(2),

43278.

- Setyono, J. (2015). Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 25-40.
- Suriani, R. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Rangka Menyelaraskan Dengan Perlindungan Hutan Konservasi Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).
- Sutrisno, S. F. (2018). Pembangunan Berkelanjutan Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Politik Hukum Dalam Tinjauan Hukum Islam.
- Zayyadi, A. (2017). Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer (Tinjauan Usul Fikih dari Teori Peningkatan Norma). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(1), 13-34.